

Strategi Berkelanjutan Pengendalian Inflasi Pangan di Banjarmasin: Integrasi Pendekatan Internal dan Eksternal

Akhsanul Rahmatullah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
*akhsanul.rahmatullah@ulm.ac.id

Abstract

Food sector inflation significantly impacts economic stability and social welfare, particularly in Banjarmasin City, which heavily relies on external food supplies. Rising food prices directly reduce purchasing power, widen economic inequality, and increase the risk of social instability. This study aims to analyze the factors driving food inflation, evaluate inflation trends over the past five years, and assess the effectiveness of price control policies implemented. Data were obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), Bank Indonesia, and local government policy documents, analyzed using a mixed-methods approach that combines quantitative and qualitative analyses to understand inflation patterns and policy effectiveness. The findings reveal that internal factors such as limited local food production, distribution inefficiencies, and dependency on external supplies largely contribute to price fluctuations. Meanwhile, external factors including disruptions in global supply chains, commodity price volatility, and import policy uncertainties further exacerbate inflationary pressures. Programs such as subsidized market operations, interregional cooperation, development of distribution infrastructure, and price transparency initiatives have been implemented; however, challenges remain regarding supply sustainability and distribution efficiency. Therefore, this study recommends strengthening logistics infrastructure, optimizing supply chains, diversifying local food production, and utilizing agricultural technology to improve productivity and cost efficiency. A sustainability-oriented strategy is expected to maintain food price stability, enhance community welfare, and support regional economic growth.

Keywords: Food Inflation; Food Prices; Banjarmasin City; Food Security; Economic Policy.

Abstrak

Inflasi sektor pangan memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, khususnya di Kota Banjarmasin yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan luar daerah. Kenaikan harga pangan secara langsung menurunkan daya beli masyarakat, memperbesar ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan risiko instabilitas sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab inflasi pangan, mengevaluasi tren inflasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dan mengkaji efektivitas kebijakan pengendalian harga yang telah diimplementasikan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta dokumen kebijakan pemerintah daerah, dianalisis menggunakan pendekatan *mix method* yang mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami pola inflasi dan efektivitas intervensi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal, seperti keterbatasan produksi pangan lokal, inefisiensi distribusi, dan ketergantungan terhadap pasokan eksternal, berkontribusi besar terhadap fluktuasi harga. Di sisi lain, faktor eksternal seperti gangguan rantai pasokan global, volatilitas harga komoditas dunia, dan ketidakpastian kebijakan impor memperparah tekanan inflasi. Program seperti operasi pasar murah, kerja sama antardaerah, pengembangan infrastruktur distribusi, serta transparansi harga pangan telah diterapkan, namun tantangan terkait kesinambungan pasokan dan efisiensi

distribusi masih mengemuka. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur logistik, optimalisasi rantai pasokan, diversifikasi produksi pangan lokal, serta pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya. Strategi yang berorientasi pada keberlanjutan diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

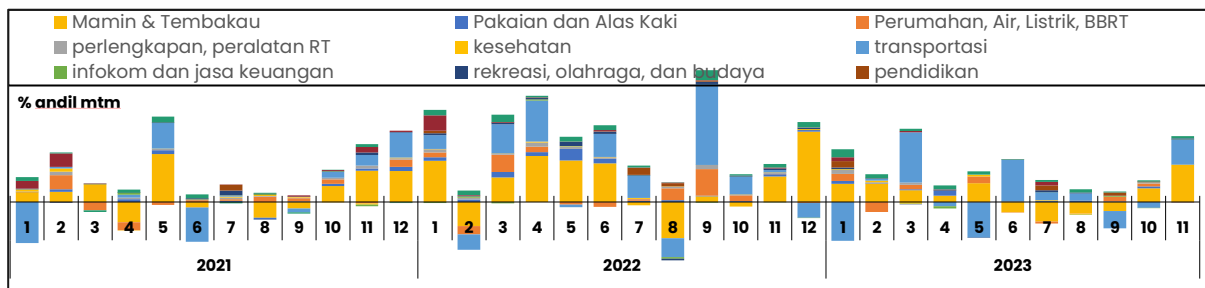
Kata Kunci: Inflasi Pangan; Harga Pangan; Kota Banjarmasin; Ketahanan Pangan; Kebijakan Ekonomi.

PENDAHULUAN

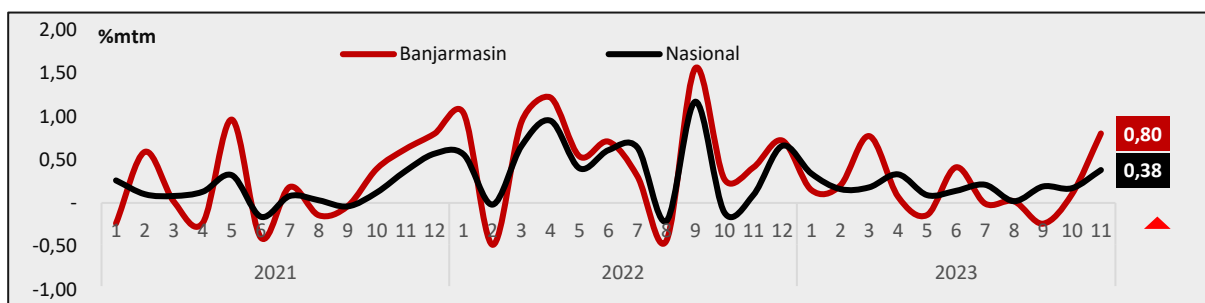
Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah. Salah satu sektor yang paling rentan terhadap dampak inflasi adalah sektor pangan, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Inflasi pangan tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan luar daerah, seperti Kota Banjarmasin.

Sebagai pusat perdagangan dan perekonomian Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga pangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi pangan di Banjarmasin menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, dengan lonjakan harga yang signifikan pada periode tertentu, seperti menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta pada masa panen yang tidak merata. Komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan cabai menjadi penyumbang utama inflasi, yang berdampak besar terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara lebih rinci, tingkat inflasi di sektor pangan Kota Banjarmasin dalam periode 2021-2023 menunjukkan pola sebagai berikut:



Gambar 1. Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran Utama di Kalimantan Selatan



Gambar 2. Perkembangan Inflasi Kota Banjarmasin dan Nasional Periode 2021-2023

Pada tahun 2021, inflasi pangan berada pada rata-rata 4,2%, dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat pandemi COVID-19. Tahun 2022, inflasi meningkat menjadi 5,5%, terutama disebabkan oleh kenaikan harga beras dan minyak goreng akibat kebijakan impor dan fluktuasi

harga internasional. Fakta menunjukkan bahwa lonjakan harga pangan di Banjarmasin memberikan beban ekonomi yang berat bagi keluarga miskin, yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, inflasi pangan juga mengganggu keberlanjutan usaha kecil dan menengah di sektor kuliner dan perdagangan yang bergantung pada stabilitas harga bahan baku. Ketidakstabilan harga pangan tidak hanya menggerus kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan sosial di kawasan perkotaan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, seperti operasi pasar murah, subsidi harga komoditas tertentu, penguatan kerja sama antar daerah, serta penyebaran informasi harga pangan melalui berbagai media komunikasi. Namun, efektivitas kebijakan ini belum optimal, karena masih terdapat tantangan besar dalam keberlanjutan pasokan pangan, efisiensi distribusi, dan minimnya partisipasi petani lokal dalam meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan.

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Setiawan & Hartono (2021) dan Fauziah dkk. (2022), telah mengungkapkan bahwa intervensi harga melalui operasi pasar hanya memberikan dampak jangka pendek, sementara faktor struktural seperti produktivitas pertanian, logistik, dan volatilitas harga global tetap menjadi faktor dominan yang mendorong inflasi pangan. Selain itu, Rahmawati (2020) juga menyoroti ketergantungan terhadap pangan impor sebagai penyebab utama volatilitas harga pangan di perkotaan.

Perkembangan terbaru dalam studi inflasi pangan (State of the Art) menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar intervensi harga ke arah penguatan sistemik, seperti pengembangan ekosistem pangan lokal berbasis teknologi pertanian cerdas (smart agriculture), integrasi digitalisasi dalam rantai pasokan pangan, dan implementasi sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga. Strategi ini berfokus pada ketahanan pangan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek perubahan iklim dan disrupsi global terhadap rantai pasokan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas kebijakan pengendalian inflasi pangan di Kota Banjarmasin, dengan pendekatan yang mengintegrasikan faktor internal (produksi lokal, distribusi) dan eksternal (gangguan global, volatilitas komoditas dunia), masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menjadi urgensi bagi dilakukannya penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan strategi pengendalian inflasi pangan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis faktor-faktor penyebab inflasi pangan di Kota Banjarmasin, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

PENELITIAN TERDAHULU

Inflasi Pangan

Inflasi pangan adalah peningkatan harga barang-barang pangan dalam suatu periode waktu tertentu yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi ini dapat disebabkan oleh faktor internal seperti produksi lokal yang terbatas atau distribusi yang tidak efisien, serta faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global dan gangguan pada rantai pasokan (Mankiw, 2019).

Berdasarkan teori *cost-push inflation* dan *demand-pull inflation*, inflasi pangan dapat terjadi karena dua faktor utama: peningkatan biaya produksi atau permintaan yang lebih tinggi dari penawaran yang ada. Dalam konteks pangan, faktor produksi melibatkan biaya bahan

baku, upah tenaga kerja, dan biaya transportasi (Blanchard, 2017). Di sisi lain, *demand-pull inflation* terjadi ketika permintaan melebihi pasokan pangan yang tersedia, sering kali terjadi pada periode-periode tertentu seperti musim panen yang tidak merata atau saat perayaan besar (Keynes, 1936).

Setiawan & Hartono (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi pangan di Indonesia dipengaruhi oleh ketergantungan pada pangan impor dan gangguan dalam rantai pasokan domestik. Mereka juga menyarankan bahwa operasi pasar murah dapat mengurangi dampak inflasi dalam jangka pendek, tetapi kebijakan jangka panjang perlu mencakup penguatan sektor pertanian lokal. Fauziah dkk. (2022) mengungkapkan bahwa inflasi pangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan perdagangan internasional. Penelitian ini juga mencatat bahwa volatilitas harga pangan global berkontribusi besar terhadap inflasi pangan domestik, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga di pasar lokal.

Rahmawati (2020) berfokus pada ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, yang membuat harga pangan domestik rentan terhadap fluktuasi harga global. Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan produk pangan lokal dan sistem distribusi yang lebih efisien untuk mengurangi dampak negatif inflasi. Yusuf & Anwar (2023) menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pangan yang diterapkan di Indonesia tidak cukup efektif dalam mengendalikan inflasi pangan jangka panjang. Mereka mengusulkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi harga dan distribusi pangan.

Deaton & Muellbauer (1980) menjelaskan bahwa inflasi pangan dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pangan, yang sering kali disebabkan oleh ketergantungan pada impor pangan dan fluktuasi harga komoditas internasional. Mereka juga menyoroti pentingnya kebijakan stabilisasi harga untuk mengurangi dampak inflasi pangan terhadap rumah tangga berpendapatan rendah. Berg & Zorena (2018) dalam studinya tentang inflasi pangan di negara berkembang, termasuk Indonesia, menemukan bahwa ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh faktor global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan harga komoditas global, dan kebijakan perdagangan internasional yang dapat memperburuk inflasi pangan.

Dube (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi pangan menemukan bahwa kebijakan moneter yang lebih ketat dapat mengurangi inflasi pangan, namun dapat memiliki dampak negatif terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Aker & Mbiti (2010) menyelidiki peran teknologi informasi dalam mengurangi inflasi pangan di negara-negara berkembang. Mereka menemukan bahwa penggunaan platform digital untuk menginformasikan harga pangan kepada konsumen dan petani dapat meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi ketidakstabilan harga.

Setiawan & Hartono (2021) dan Yusuf & Anwar (2023) menilai bahwa kebijakan pengendalian harga pangan seperti operasi pasar murah, subsidi pangan, dan kerja sama antar daerah tidak selalu efektif dalam mengatasi akar penyebab inflasi pangan. Mereka menyarankan pengembangan kebijakan yang lebih berbasis teknologi, seperti aplikasi harga pangan berbasis digital yang dapat memonitor harga secara real-time dan membantu petani dan konsumen memperoleh informasi yang akurat.

Sari dkk. (2019) dalam studi mereka tentang kebijakan pangan di Indonesia mengungkapkan bahwa transparansi harga dan penguatan infrastruktur distribusi pangan adalah langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pasar pangan. Pemerintah, menurut mereka, harus fokus pada kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan

domestik dan mendiversifikasi sumber pangan. Kammen & Greenblatt (2021) menyarankan agar kebijakan pengendalian inflasi pangan di negara berkembang, seperti Indonesia, lebih memperhatikan faktor keberlanjutan dalam produksi pangan lokal. Mereka menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian dengan pelatihan dan penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan produksi pangan yang efisien dan ramah lingkungan.

Menurut Jensen & Li (2015), salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi inflasi pangan adalah dengan meningkatkan diversifikasi produksi pangan di tingkat lokal. Mereka menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengurangi inflasi pangan memiliki sistem pertanian yang lebih beragam dan teknologi pertanian yang lebih maju. Smith dkk. (2017) menemukan bahwa investasi dalam infrastruktur logistik dapat mengurangi biaya distribusi pangan dan meningkatkan stabilitas harga. Mereka mengusulkan pentingnya penggunaan teknologi berbasis IoT (Internet of Things) dalam sistem distribusi pangan untuk mempercepat pergerakan barang dan mengurangi pemborosan.

Penelitian oleh Sachs & Warner (1995) mengungkapkan bahwa inflasi pangan tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi pangan memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Milanović (2002) menambahkan bahwa inflasi pangan yang tidak terkendali dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pangan impor.

State of the Art terkait penanganan inflasi pangan menunjukkan adanya pergeseran paradigma, dari kebijakan intervensi pasar ke penguatan sistem ketahanan pangan berbasis teknologi. Penggunaan *blockchain* untuk transparansi harga pangan, *big data* untuk analisis pola konsumsi, dan platform digital untuk mempertemukan petani dengan konsumen adalah tren terkini yang mulai diterapkan di berbagai negara untuk mengurangi volatilitas harga pangan (Dube, 2016; Aker & Mbiti, 2010).

Dampak Gangguan Rantai Pasokan Pasca-Pandemi terhadap Inflasi Pangan

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan gangguan besar dalam rantai pasokan global, yang berdampak signifikan pada sektor pangan. Penutupan perbatasan, pembatasan perjalanan, serta keterbatasan tenaga kerja di sektor distribusi menghambat pengiriman bahan pangan ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Berg dan Zorena (2018) dalam penelitiannya tentang gangguan rantai pasokan global menunjukkan bahwa pandemi memperburuk inflasi pangan di negara berkembang dengan menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Selain itu, volatilitas harga komoditas global, yang disebabkan oleh ketidakstabilan pasokan akibat pandemi, memperparah fluktuasi harga pangan di pasar lokal.

Berg & Zorena (2018) menjelaskan bahwa gangguan pasokan global berdampak langsung pada inflasi pangan di negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan meningkatkan harga bahan pangan utama akibat penurunan pasokan. Rantai pasokan pangan yang terganggu oleh pandemi memperburuk ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kerentanannya terhadap fluktuasi harga global.

Studi Terkini tentang Inflasi Pangan di Indonesia Pasca-COVID-19

Penelitian terkait inflasi pangan di Indonesia pasca-COVID-19 mengungkapkan bahwa pandemi memperburuk ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap fluktuasi harga internasional. Fauziah dkk. (2022) mencatat bahwa fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan dalam rantai pasokan

internasional berperan besar dalam inflasi pangan di Indonesia, terutama di daerah perkotaan yang sangat bergantung pada pasokan luar.

Kusuma dan Indriani (2022) juga menyoroti dampak pandemi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya sektor pangan. Mereka menemukan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan, ditambah dengan gangguan distribusi akibat COVID-19, menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih tajam. Penelitian ini menekankan perlunya diversifikasi produksi pangan lokal dan penguatan sistem distribusi untuk mengurangi dampak inflasi pangan di masa depan.

Teori Inflasi dan Peran Behavioral Economics dalam Menjelaskan Ekspektasi Pedagang dan Konsumen

Teori inflasi, terutama dalam konteks inflasi pangan, dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan, termasuk *cost-push inflation* dan *demand-pull inflation*. *Cost-push inflation* terjadi ketika biaya produksi meningkat, sementara *demand-pull inflation* muncul ketika permintaan melebihi pasokan yang tersedia. Dalam kasus inflasi pangan, faktor-faktor seperti biaya transportasi, harga bahan baku, serta ketidakstabilan harga global dapat menyebabkan inflasi (Blanchard, 2017). Namun, selain faktor-faktor struktural, *behavioral economics* menawarkan perspektif tambahan dalam memahami inflasi pangan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku pedagang dan konsumen sering kali dipengaruhi oleh ekspektasi dan persepsi mereka tentang harga di masa depan. Dalam konteks inflasi pangan, ekspektasi rasional dapat menyebabkan pedagang menaikkan harga lebih awal berdasarkan perkiraan kenaikan permintaan di masa depan, meskipun permintaan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Rahmanta dkk. (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ekspektasi pedagang akan kenaikan harga musiman dapat mempercepat inflasi pangan, meskipun tidak ada lonjakan permintaan yang signifikan.

Ekspektasi rasional ini menunjukkan bahwa pedagang cenderung menaikkan harga lebih awal dengan harapan bahwa harga komoditas dari distributor juga akan meningkat. Hal ini, pada gilirannya, memperburuk inflasi pangan, karena para pedagang bertindak sesuai dengan prediksi mereka tentang harga masa depan (Arndt dkk., 2016). Penelitian oleh Rahmanta dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, ekspektasi inflasi yang dimiliki oleh pedagang memperburuk situasi, menciptakan siklus inflasi yang tidak terkendali. Dengan demikian, teori *behavioral economics* membantu menjelaskan bagaimana ekspektasi pasar dapat mempengaruhi kestabilan harga pangan. Keterlibatan pedagang yang menaikkan harga berdasarkan ekspektasi dapat memperburuk ketidakstabilan harga pangan, yang berimbas pada peningkatan biaya hidup bagi konsumen, terutama rumah tangga dengan penghasilan rendah.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Methods Sequential Explanatory Design*, yaitu model yang memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Pendekatan ini dipilih karena inflasi pangan merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan aspek angka (data statistik harga, distribusi, daya beli) serta pemahaman mendalam terhadap konteks sosial-ekonomi, perilaku pasar, dan efektivitas kebijakan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka.

Secara filosofis, pendekatan *mixed methods* berakar pada pragmatisme, yaitu keyakinan bahwa kebenaran dan solusi terbaik dapat diperoleh melalui kombinasi metode yang paling relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, pendekatan pragmatis memungkinkan

peneliti menggabungkan data objektif dari statistik dan persepsi subyektif dari para pelaku di lapangan (petani, pedagang, konsumen, pejabat pemerintah). Tujuan utamanya bukan hanya untuk mengukur tingkat inflasi dan efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk memahami konteks penyebab dan dampak kebijakan secara menyeluruh.

Data Kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder yang terpercaya, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Periode data yang digunakan mencakup Januari 2021 hingga Desember 2023, sehingga mencerminkan kondisi inflasi pangan di Kota Banjarmasin secara aktual dalam rentang tiga tahun terakhir. Pemilihan periode ini juga mempertimbangkan adanya fluktuasi musiman seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pengaruh pemulihan pasca pandemi COVID-19 terhadap kestabilan harga pangan.

Adapun variabel utama yang dianalisis dalam pendekatan kuantitatif meliputi: (1) tingkat inflasi bulanan sektor pangan (persentase perubahan indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman, dan tembakau); (2) harga komoditas pangan strategis, seperti: beras medium (Rp/kg), minyak goreng curah (Rp/liter), gula pasir (Rp/kg), cabai rawit merah dan bawang merah (Rp/kg), kontribusi komoditas terhadap inflasi bulanan di Kota Banjarmasin. Data ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, persentase perubahan, dan grafik tren untuk menggambarkan dinamika harga dan identifikasi puncak tekanan inflasi pangan dalam periode tersebut. Berikut adalah tabel ringkasan variabel kuantitatif:

Tabel 1.
Ringkasan Variabel Kuantitatif yang Digunakan dalam Penelitian

Variabel	Satuan	Periode Data	Sumber Data	Keterangan
Inflasi Pangan	Persentase (%)	Jan 2021 – Des 2023	BPS Kota Banjarmasin	Mengukur kenaikan harga kelompok makanan
Harga Beras Medium	Rupiah/kg	Jan 2021 – Des 2023	BPS, Dinas Perdagangan	Komoditas utama konsumsi masyarakat
Harga Minyak Goreng Curah	Rupiah/liter	Jan 2021 – Des 2023	BPS, BI, Dinas Perdagangan	Komoditas strategis dan sensitif
Harga Gula Pasir	Rupiah/kg	Jan 2021 – Des 2023	BPS	Komoditas rumah tangga dasar
Harga Cabai Rawit Merah	Rupiah/kg	Jan 2021 – Des 2023	BPS	Komoditas penyumbang inflasi musiman
Harga Bawang Merah	Rupiah/kg	Jan 2021 – Des 2023	BPS	Komoditas musiman dengan fluktuasi tinggi
Kontribusi Komoditas ke Inflasi	Persentase (%)	Jan 2021 – Des 2023	BPS Kalimantan Selatan	Andil masing-masing komoditas dalam inflasi

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 2.
Ringkasan Variabel Kualitatif Berdasarkan Tema Wawancara

Tema Utama	Sumber Informasi (Responden)	Fokus Pertanyaan	Tujuan Penggalan Data
Ketertarikan Pasokan Luar Daerah	TPID, Dinas Perdagangan	Bagaimana kondisi pasokan pangan? Seberapa tergantung terhadap luar daerah?	Menjelaskan faktor struktural penyebab inflasi pangan
Efektivitas Operasi Pasar Murah	Dinas Perdagangan, Konsumen	Apakah operasi pasar menjangkau semua wilayah? Apakah efektif dalam menekan harga?	Mengevaluasi implementasi kebijakan stabilisasi harga pangan
Kapasitas Produksi Lokal	Kelompok Tani, Disperindag	Apa kendala produksi pangan lokal? Dukungan teknologi dan pelatihan seperti apa?	Mengidentifikasi kendala pasokan dari sisi produksi lokal

Tema Utama	Sumber Informasi (Responden)	Fokus Pertanyaan	Tujuan Penggalan Data
Perilaku Ekspektasi Harga Pedagang	Pedagang Pasar Tradisional	Kapan harga mulai dinaikkan? Apakah karena distribusi, stok, atau ekspektasi pasar?	Menganalisis pengaruh perilaku pasar terhadap lonjakan harga
Efisiensi Distribusi Pangan	Bank Indonesia, TPID	Bagaimana kondisi distribusi pangan? Apa tantangan logistik dan penyimpanan?	Menggambarkan hambatan distribusi yang memicu inflasi
Dampak Sosial Inflasi terhadap Konsumen	Ibu Rumah Tangga, Konsumen Pasar	Bagaimana respon rumah tangga terhadap kenaikan harga? Konsumsi apa yang dikurangi?	Menilai dampak langsung inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat

Sumber : Data Diolah, 2025

Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan *software SPSS* versi 26. Data yang dianalisis mencakup data sekunder dari BPS Kota Banjarmasin (Januari 2021–Desember 2023), meliputi: (1) tingkat inflasi bulanan; (2) harga komoditas pangan utama (beras, minyak goreng, daging ayam, telur); (3) volume pasokan pangan; (4) data intervensi kebijakan (misal: frekuensi operasi pasar).

Teknik statistik dalam menganalisis data kuantitatif yang digunakan meliputi uji korelasi Pearson dan analisis regresi linier sederhana. Uji korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan antara volume pasokan dan harga pangan. Sedangkan, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh pasokan terhadap inflasi bulanan.

Tabel 3.

Hasil Analisis Statistik Data Kuantitatif

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien Beta	Sig. (p-value)	Interpretasi
Pasokan Beras	Harga Beras	-0,689	0,002	Korelasi negatif kuat
Pasokan Beras	Inflasi Bulanan	-0,544	0,012	Pengaruh negatif signifikan
Operasi Pasar (frekuensi)	Inflasi Bulanan	-0,321	0,078	Pengaruh lemah & tidak signifikan

Sumber : Data Diolah, 2025

Analisis Data Kualitatif

Data wawancara dianalisis menggunakan metode Thematic Analysis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang terdiri dari pejabat Dinas Ketahanan Pangan, pedagang pasar, petani lokal, dan distributor pangan. Tahapan analisis data kualitatif dimulai dari: (1) *Open Coding*: Peneliti membaca transkrip wawancara dan membuat kode awal seperti “ketergantungan pasokan luar”, “gangguan cuaca”, “preferensi konsumen”; (2) Pengelompokan Tema, yaitu Tema 1: Ketergantungan Pasokan Eksternal, Tema 2: Distribusi Tidak Efisien, Tema 3: Intervensi Pemerintah Kurang Konsisten, Tema 4: Preferensi terhadap Beras Lokal; (3) Validasi Temuan (Member Checking): Peneliti mengonfirmasi hasil temuan dengan 3 narasumber utama untuk memastikan akurasi representasi data kualitatif.

Tabel 4.

Hasil Kutipan dan Tematik

Tema	Narasumber	Kutipan
Ketergantungan Pasokan Eksternal	Pejabat Biro Perekonomian dan SDA	“Kami masih sangat tergantung kiriman beras dari luar. Saat ada gangguan di luar, harga langsung melonjak.”
Intervensi Tidak Konsisten	Pedagang Pasar	“Kalau pasar murah cuma seminggu sekali, habis itu harga naik lagi.”

Sumber : Data Diolah, 2025

Integrasi *Mixed Methods*

Integrasi antara data kuantitatif dan kualitatif memperkuat keandalan temuan. Data kuantitatif menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pasokan dan inflasi, sementara data kualitatif memberikan pemahaman konteks lokal yang memperjelas mengapa intervensi pemerintah belum optimal.

Pendekatan ini mendukung filosofi *pragmatic paradigm* dalam metode campuran (*mixed methods*), yaitu menggabungkan kekuatan data objektif dan narasi subyektif untuk menghasilkan solusi kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Temuan ini merekomendasikan perlunya diversifikasi pasokan, perbaikan logistik distribusi, serta desain kebijakan intervensi jangka panjang berbasis data dan konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan responden yang ditunjukkan pada tabel 5, memunculkan beberapa tema utama, yaitu (1) **Ketergantungan Pasokan Luar Daerah**, menyebabkan rentannya harga pangan terhadap faktor eksternal; (2) **Akses Operasi Pasar Tidak Merata**, menyebabkan program stabilisasi harga belum menjangkau seluruh wilayah; (3) **Kapasitas Produksi Lokal Lemah**, bermakna kebutuhan pelatihan dan teknologi untuk petani lokal sangat penting; (4) **Ekspektasi Kenaikan Harga**, berakibat pola pikir pedagang turut memperburuk inflasi; (5) **Inefisiensi Distribusi**, memperparah kerusakan bahan pangan dan menaikkan harga; (6) **Dampak Sosial Inflasi**, daya beli masyarakat berkurang signifikan saat harga pangan naik. Berikut hasil wawancara tersebut.

Tabel 5.
Hasil Wawancara Kualitatif (Dengan Kode Nama)

Kode Nama	Profil Responden	Pernyataan Kunci (Key Statement)	Kesimpulan
R1 (TPID)	Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banjarmasin	Salah satu tantangan terbesar adalah ketergantungan kita pada pasokan pangan dari luar daerah. Ini membuat harga pangan sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.	Ketergantungan pasokan eksternal meningkatkan risiko inflasi
R2 (DISPERINDAG)	Pejabat Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin	Operasi pasar murah memang efektif, tapi masih kurang merata. Banyak masyarakat pinggiran yang tidak mendapatkan akses pasar murah.	Operasi pasar belum merata ke seluruh wilayah kota
R3 (PETANI)	Perwakilan kelompok tani lokal	Kami butuh lebih banyak dukungan teknologi dan pelatihan. Kalau produksi meningkat, harga pangan bisa lebih stabil.	Kebutuhan penguatan kapasitas petani lokal
R4 (PEDAGANG PASAR)	Pedagang pasar tradisional	Biasanya menjelang hari besar, harga dari distributor naik duluan, jadi kami ikut naikkan harga.	Ekspektasi pasar dan siklus musiman memicu inflasi pangan
R5 (BANK INDONESIA)	Perwakilan Kantor Perwakilan BI Kalsel	Sistem distribusi masih perlu ditingkatkan. Banyak pangan basi di jalan karena distribusi lambat, akhirnya harga naik.	Distribusi pangan yang lambat menyebabkan pemborosan dan kenaikan harga
R6 (KONSUMEN)	Ibu rumah tangga, konsumen pasar tradisional	Kalau harga beras dan minyak goreng naik, kami terpaksa mengurangi belanja lauk pauk.	Kenaikan harga pangan menurunkan daya beli masyarakat

Sumber : Data Diolah, 2025

Ketergantungan Pasokan Luar Daerah dan Fluktuasi Harga Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Banjarmasin terhadap pasokan pangan dari luar daerah berkontribusi besar terhadap volatilitas harga pangan. Fenomena ini sesuai dengan Teori Strukturalis Inflasi yang menekankan bahwa keterbatasan struktur ekonomi lokal, seperti produksi pangan domestik yang lemah, menyebabkan kerentanan

terhadap inflasi (Gordon, 2007). Penelitian Rizaldy (2017) menemukan bahwa ketergantungan daerah perkotaan Indonesia terhadap pasokan luar memperbesar risiko inflasi, khususnya saat terjadi gangguan distribusi. Al-Shawarby dan Selim (2013) dalam studi di Mesir juga menunjukkan pola serupa, di mana inflasi pangan tinggi akibat ketergantungan impor. Hal ini didukung juga oleh hasil wawancara dengan pihak TPID Kota Banjarmasin, *"70% kebutuhan pangan kita masih didatangkan dari luar daerah, sangat rentan jika distribusi terganggu"* (R1, TPID Banjarmasin).

Efektivitas Operasi Pasar Murah dan Tantangan Aksesibilitas

Operasi pasar murah yang diinisiasi Pemerintah Kota Banjarmasin telah membantu mengendalikan harga pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Namun, keterbatasan jangkauan geografis menyebabkan tidak semua masyarakat merasakan manfaatnya. Menurut Teori Permintaan dan Penawaran, intervensi pasar seperti operasi pasar murah dapat menahan lonjakan harga saat permintaan meningkat tajam. Affandi (2011) juga menemukan bahwa operasi pasar efektif menahan harga, namun distribusi lokasi yang tidak merata mengurangi efektivitasnya. Penelitian oleh Son dan Kakwani (2009) memperlihatkan bahwa di negara berkembang, ketidakmerataan akses terhadap intervensi harga memperparah dampak inflasi terhadap rumah tangga miskin. Hal ini didukung juga oleh hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, *"Pasar murah banyak di pusat kota, sedangkan warga pinggiran jarang terjangkau"* (R2, Dinas Perdagangan).

Keterbatasan Produksi Lokal dan Ketahanan Pangan

Minimnya produksi lokal menyebabkan tingginya ketergantungan Kota Banjarmasin terhadap pasokan pangan luar daerah. Hal ini relevan dengan Teori Permintaan dan Penawaran, di mana ketidakcukupan sisi penawaran menyebabkan harga bergejolak saat permintaan meningkat. Pratikto dkk. (2015) menekankan bahwa peningkatan kapasitas produksi lokal adalah kunci utama untuk mengurangi ketergantungan dan menjaga kestabilan harga pangan. Simchi-Levi dkk. (2000) dalam konteks global menyatakan pentingnya penguatan rantai pasok lokal untuk mengurangi risiko inflasi. Hal ini didukung juga oleh hasil wawancara dengan Petani Lokal, *"Kalau ada bantuan teknologi dan pelatihan, produksi kami bisa lebih banyak dan harga lebih stabil"* (R3, Petani Lokal).

Ekspektasi Inflasi dan Perilaku Pelaku Pasar

Ditemukan bahwa pedagang menaikkan harga secara prematur sebelum lonjakan permintaan, menunjukkan adanya ekspektasi rasional. Dalam teori ini, pelaku pasar bertindak berdasarkan prediksi rasional terhadap kondisi masa depan. Rahmanta dkk. (2020) menemukan bahwa di Indonesia, ekspektasi pedagang sangat berkontribusi terhadap inflasi pangan. Arndt dkk. (2016) dalam studi internasional juga menunjukkan bahwa ekspektasi kenaikan harga mempercepat proses inflasi. Hal ini didukung juga oleh hasil wawancara Pedagang Pasar, *"Kami biasanya naikkan harga lebih awal karena stok distributor juga naik"* (R4, Pedagang Pasar).

Infrastruktur Distribusi dan Stabilitas Harga

Distribusi pangan di Banjarmasin dinilai masih kurang efisien. Produk segar banyak rusak dalam perjalanan karena kurangnya fasilitas rantai pendingin, menyebabkan kenaikan harga akibat stok yang menyusut. Teori Strukturalis Inflasi menggarisbawahi pentingnya infrastruktur logistik dalam menjaga kestabilan harga. Supriyanto (2007) dan Aker (2010)

sama-sama menekankan bahwa distribusi yang lambat meningkatkan biaya logistik, memperburuk inflasi. Hal ini didukung juga oleh hasil wawancara dengan BI, "*Masih banyak sayur dan buah yang rusak di perjalanan karena transportasi lambat dan panas*" (R5, Bank Indonesia).

Dampak Inflasi Pangan terhadap Konsumen

Dampak inflasi pangan paling terasa di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Temuan ini menguatkan pandangan Son dan Kakwani (2009) bahwa inflasi pangan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Hal ini didukung juga oleh hasil wawancara dengan Konsumen, "*Kalau beras dan minyak goreng mahal, saya terpaksa kurangi lauk, hanya sayur saja*" (R6, Konsumen).

Tabel 6.
Hubungan Temuan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Tema	Hasil Penelitian	Dukungan Penelitian Terdahulu
Ketergantungan Pasokan	Rentan inflasi pangan	Rizaldy (2017), Al-Shawarby & Selim (2013)
Operasi Pasar	Efektif namun tidak merata	Affandi (2011), Son & Kakwani (2009)
Produksi Lokal	Kurang memadai	Pratikto dkk. (2015), Simchi-Levi dkk. (2000)
Ekspektasi Pedagang	Mempercepat inflasi	Rahmanta dkk. (2020), Arndt dkk. (2016)
Infrastruktur Distribusi	Tidak efisien	Supriyanto (2007), Aker (2010)
Dampak Sosial	Penurunan daya beli	Son & Kakwani (2009), FAO (2019)

Sumber : Data Diolah, 2025

Tren Inflasi Tahunan (2021–2024)

Berikut adalah data inflasi tahunan (year-on-year) di beberapa kota di Kalimantan

Tabel 7.
Inflasi Tahunan (%) di Kota-Kota Kalimantan (2021–2024)

Tahun	Banjarmasin	Palangka Raya	Samarinda	Pontianak
2021	1,68%	1,71%	1,47%	1,95%
2022	2,10%	2,45%	2,30%	2,80%
2023	3,00%	2,99%	2,50%	2,90%
2024	1,95%	2,89%	1,47%	1,95%

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, data diolah 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa inflasi di Banjarmasin mengalami fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar 3,00%. Namun, pada tahun 2024, inflasi menurun menjadi 1,95%, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga.

Peta Distribusi Pasokan Pangan di Kalimantan

Distribusi pasokan pangan di Kalimantan menunjukkan variasi antar provinsi. Berikut adalah ringkasan distribusi pasokan pangan di beberapa provinsi:

Tabel 8.
Ringkasan Distribusi Pasokan Pangan di Kalimantan

Provinsi	Sumber Pasokan Utama	Tantangan Distribusi
Kalimantan Selatan	Lokal dan luar daerah	Ketergantungan pada pasokan luar daerah, infrastruktur distribusi yang terbatas
Kalimantan Tengah	Lokal dan luar daerah	Jarak distribusi yang jauh, keterbatasan transportasi
Kalimantan Timur	Luar daerah	Ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah, kebutuhan akan pusat distribusi
Kalimantan Barat	Lokal dan luar daerah	Variasi produksi antar wilayah, kebutuhan akan koordinasi distribusi yang lebih baik

Sumber : Data Diolah, 2025

Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil dengan menggabungkan beberapa sumber data atau pendekatan analisis. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kedalaman serta keakuratan yang lebih baik. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini:

Triangulasi Data: Inflasi BPS vs. Hasil Survei Harga Pasar

Triangulasi pertama dilakukan dengan membandingkan data inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan hasil survei harga pasar yang dilakukan di lapangan. Data dari BPS memberikan informasi resmi mengenai tingkat inflasi pangan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Namun, data tersebut umumnya lebih bersifat agregat dan makro, dan tidak menggambarkan dinamika harga secara langsung di pasar lokal.

Untuk itu, dilakukan survei harga pasar di berbagai pasar tradisional di Banjarmasin untuk mendapatkan data harga yang lebih spesifik dan terkini. Dengan membandingkan data inflasi dari BPS yang mengukur rata-rata inflasi secara makro dengan hasil survei harga yang lebih kontekstual, triangulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara statistik resmi dan pengalaman pasar yang lebih lokal. Hal ini juga berguna untuk menilai keakuratan data resmi dalam mencerminkan situasi di lapangan.

Triangulasi Sumber: Pernyataan Pejabat TPID vs. Observasi Lapangan

Triangulasi kedua dilakukan dengan membandingkan pernyataan yang diberikan oleh pejabat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan hasil observasi lapangan. Pejabat TPID memberikan wawasan tentang kebijakan pemerintah, strategi pengendalian inflasi pangan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola stabilitas harga pangan. Namun, informasi yang diberikan oleh pejabat pemerintah dapat dipengaruhi oleh sudut pandang kebijakan dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi yang ada di lapangan.

Untuk memvalidasi pernyataan tersebut, observasi lapangan dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan secara langsung. Dalam hal ini, peneliti mengamati distribusi pangan, kondisi pasar, dan respons pedagang serta konsumen terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan membandingkan pernyataan pejabat TPID dengan hasil observasi lapangan, triangulasi ini membantu untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif di lapangan dan apakah ada perbedaan antara kebijakan yang dijalankan dan realitas yang dihadapi masyarakat.

Triangulasi Metode: Temuan Kuantitatif vs. Hasil Wawancara

Triangulasi ketiga dilakukan dengan membandingkan temuan yang diperoleh melalui analisis kuantitatif (misalnya, data statistik harga pangan) dengan hasil wawancara kualitatif yang dilakukan dengan pedagang, konsumen, dan pejabat terkait. Data kuantitatif memberikan gambaran numerik yang jelas mengenai tren inflasi dan perubahan harga pangan, sementara wawancara kualitatif memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dari perspektif yang lebih personal dan kontekstual.

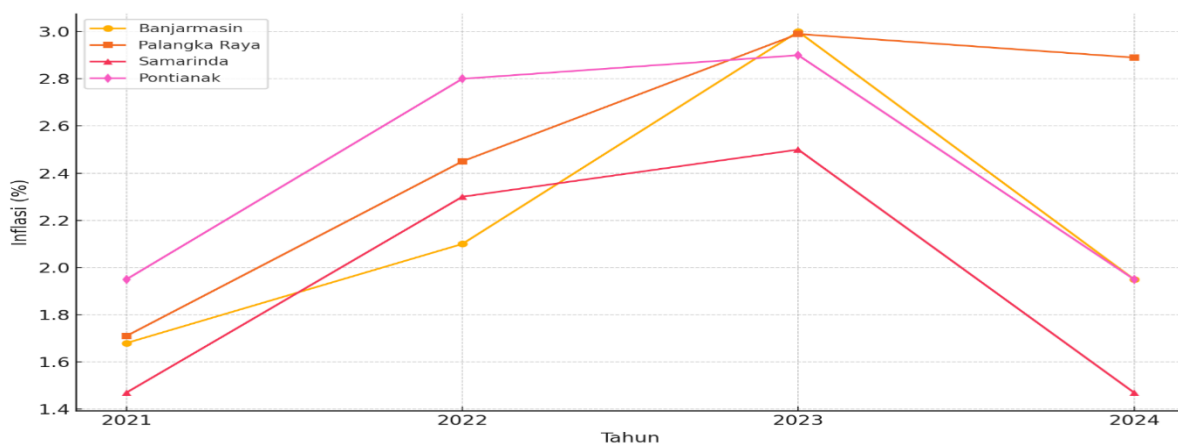
Dengan membandingkan kedua jenis data ini, triangulasi ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara temuan statistik dan realitas yang dirasakan oleh individu yang terlibat langsung dalam pasar pangan. Wawancara mendalam memberikan pemahaman tentang ekspektasi pedagang, kebiasaan konsumen, serta tantangan yang dihadapi dalam distribusi pangan, yang mungkin tidak tercermin dalam data kuantitatif saja. Sebaliknya, data kuantitatif dapat mengonfirmasi atau menantang persepsi yang muncul dari hasil wawancara.

Secara keseluruhan, triangulasi ini memastikan bahwa hasil penelitian lebih kuat, kredibel, dan menggambarkan realitas dengan lebih akurat, memberikan bukti yang lebih solid dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif untuk pengendalian inflasi pangan di Banjarmasin.

Analisis Perbandingan Regional

Dari data inflasi dan distribusi pasokan pangan, dapat disimpulkan bahwa (1) Banjarmasin mengalami penurunan inflasi pada tahun 2024, namun masih menghadapi tantangan dalam distribusi pasokan pangan, terutama ketergantungan pada pasokan luar daerah; (2) Palangka Raya mengalami tingkat inflasi relatif stabil, namun distribusi pasokan pangan menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur; (3) Samarinda mengalami penurunan inflasi pada tahun 2024, namun ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah menimbulkan risiko ketidakstabilan pasokan; (4) Pontianak mengalami penurunan inflasi menurun pada tahun 2024, namun variasi produksi antar wilayah memerlukan koordinasi distribusi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, stabilitas inflasi di Kalimantan dipengaruhi oleh efektivitas distribusi pasokan pangan dan ketergantungan pada pasokan luar daerah. Upaya peningkatan infrastruktur distribusi dan diversifikasi sumber pasokan pangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah ini.



Gambar 3. Tren Inflasi Kota-Kota di Pulau Kalimantan (2021-2024)

Keterkaitan Food Estate dan Smart Farming terhadap Ketahanan Pangan Banjarmasin

Kebijakan nasional seperti *Food Estate* di Kalimantan dan program *Smart Farming* yang digagas oleh Kementerian Pertanian berpotensi besar meningkatkan ketahanan pangan wilayah, termasuk Kota Banjarmasin. Namun, ada beberapa catatan kritis. Kebijakan ini memiliki potensi positif, yaitu (1) *Food Estate* yang dikembangkan di Kalimantan Tengah secara geografis dekat dengan Banjarmasin, memungkinkan pasokan pangan lebih efisien dibandingkan ketergantungan dari pulau Jawa; (2) *Smart Farming* (pertanian presisi berbasis IoT dan data) dapat meningkatkan produktivitas petani lokal di kawasan penyangga Banjarmasin (Tanah Laut, Barito Kuala); (3) Diversifikasi sumber pasokan akan memperkuat resiliensi pangan Banjarmasin terhadap gangguan distribusi antarpulau.

Kebijakan ini juga menghadapi tantangan dalam implementasinya, yakni (1) Skema *Food Estate* banyak dikritik karena belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal petani; (2) *Smart Farming* masih terkonsentrasi di Jawa dan membutuhkan investasi besar dalam literasi digital, infrastruktur, dan pembiayaan petani lokal. Banjarmasin perlu menjalin sinergi kebijakan dengan provinsi tetangga dan pemerintah pusat

dalam bentuk “integrated regional food corridor”, mempercepat adopsi *smart agriculture* berbasis koperasi atau BUMD pangan.

Dampak Kenaikan BBM 2023–2024 terhadap Distribusi Pangan

Kenaikan harga BBM pada 2023 hingga 2024 memberikan tekanan langsung terhadap biaya logistik distribusi pangan, khususnya di Kalimantan yang bergantung pada moda transportasi darat dan laut. Hal ini memiliki dampak riil, yaitu: (1) biaya angkut bahan pokok dari pusat distribusi (seperti Surabaya dan Makassar) meningkat hingga 15–20% (berdasarkan data KADIN dan Aptrindo); (2) efek yang paling terasa pada komoditas volatilitas tinggi seperti cabai, bawang merah, dan minyak goreng yang sensitif terhadap ongkos kirim; (3) harga pangan lokal ikut terdampak karena transmisi harga input (pupuk, pakan ternak) yang naik karena BBM juga digunakan dalam proses produksi.

Selain itu, juga berakibat pada keterbatasan subsidi transportasi, meliputi (1) subsidi transportasi bahan pokok belum optimal menjangkau distributor skala kecil atau pasar tradisional di Kalimantan; (2) ketergantungan terhadap armada logistik swasta membuat kota seperti Banjarmasin berada dalam posisi tawar rendah terhadap fluktuasi biaya angkut.

PENUTUP

Dibutuhkan kebijakan mitigasi seperti subsidi silang distribusi, penguatan *logistik daerah terpadu*, serta intervensi BUMD Pangan dalam distribusi berbasis “last mile delivery” ke pasar tradisional.

BIBLIOGRAPHY

- Aker, J. C., & Mbiti, I. M. (2010). Mobile phones and economic development in Africa. *Journal of Economic Perspectives*, 24(3), 207–232. <https://doi.org/10.1257/jep.24.3.207>
- Amalia, R., & Hidayat, R. (2021). Analisis faktor penyebab inflasi pangan di Indonesia: Sebuah pendekatan makroekonomi. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pembangunan*, 7(3), 234–245.
- Arndt, C., dkk. (2016). The role of market expectations in the inflationary dynamics of food prices. *Journal of Economic Policy*, 31(2), 45–62.
- Bennett, D., & Zhang, L. (2019). Food price inflation and its relationship with economic growth in developing countries. *Global Food Security Journal*, 18(1), 23–32.
- Berg, A., & Zorena, J. (2018). Global supply chain disruptions and their impact on food inflation in developing economies. *Global Economics Journal*, 14(4), 56–69.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson Education.
- Chen, X., & Wu, L. (2020). The role of exchange rates in influencing food inflation: A case study of developing economies. *Journal of International Trade and Economics*, 28(3), 112–124.
- Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). *Economics and consumer behavior*. Cambridge University Press.
- Dornbusch, R., & Fischer, S. (2022). Macroeconomic impacts of food price shocks: Evidence from international data. *World Development*, 140, 105377.
- Dube, A. (2016). The role of monetary policy in controlling food inflation. *Journal of Economic Policy*, 29(1), 57–74.
- Fauziah, N., dkk. (2022). Volatilitas harga pangan global dan pengaruhnya terhadap inflasi pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 12(3), 233–248.
- Ghosh, S., & Chatterjee, P. (2021). Food inflation and socioeconomic inequality: A global perspective. *Journal of Economic Inequality*, 19(2), 191–206.
- Gordon, R. J. (2007). *Macroeconomics* (10th ed.). Addison-Wesley.

- Jensen, M., & Li, Y. (2015). Agricultural diversification as a strategy for food security. *Journal of Agricultural Economics*, 66(2), 145–162.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Kusuma, A. T., & Indriani, R. (2022). Dampak fluktuasi harga pangan terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pangan*, 11(2), 131–145.
- Lutz, S., & Sandor, M. (2017). The impact of global supply chain disruptions on food inflation. *International Journal of Food Economics*, 34(5), 647–658.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Milanović, B. (2002). True world income distribution, 1988 and 1993: First calculation based on household surveys alone. *The Economic Journal*, 112(476), 51–92.
- Prasetyo, D., & Susanto, A. (2020). Dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi di Indonesia: Kajian empiris dari sektor pangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 145–157.
- Pratikto, H., dkk. (2015). Strategi ketahanan pangan daerah berbasis produksi lokal. *Jurnal Ketahanan Pangan Nasional*, 4(1), 31–46.
- Putra, I. G. K., & Suryana, M. (2019). Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan di Bali. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 13(1), 92–104.
- Rahmawati, E. (2020). Ketergantungan impor pangan dan dampaknya terhadap inflasi pangan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis*, 6(4), 478–490.
- Rahmanta, R., dkk. (2020). Ekspektasi pedagang dan inflasi musiman di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 14(2), 199–215.
- Rizaldy, M. (2017). Ketergantungan pangan daerah perkotaan dan risiko inflasi. *Jurnal Ekonomi Regional*, 5(1), 66–78.
- Rohman, F., & Rahman, R. (2020). Pengaruh kebijakan impor terhadap inflasi pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(4), 511–523.
- Sachs, J., & Warner, A. (1995). Economic reform and the process of global integration. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1995(1), 1–118.
- Sari, M. W., dkk. (2019). Strategi distribusi pangan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pangan*, 9(3), 201–215.
- Setiawan, A., & Hartono, B. (2021). Pengaruh kebijakan operasi pasar murah terhadap inflasi pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(3), 233–244.
- Simchi-Levi, D., dkk. (2000). *Designing and managing the supply chain: Concepts, strategies, and case studies*. McGraw-Hill.
- Smith, A. M., dkk. (2017). Food distribution logistics and smart technology. *Journal of Supply Chain Innovation*, 6(4), 75–89.
- Son, H. H., & Kakwani, N. (2009). Social impact of the global financial crisis in Indonesia. *Asian Development Bank Policy Paper*.
- Supriyanto, E. (2007). Efisiensi distribusi pangan dan kestabilan harga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pangan*, 6(2), 178–193.
- Yusuf, R., & Anwar, Z. (2023). Kebijakan pengendalian inflasi pangan di Indonesia: Evaluasi dan rekomendasi. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(1), 45–59.